
EVALUASI SISTEM ZONASI TERHADAP DAYA SERAP PESERTA DIDIK

Andika Pramaissella¹⁾, Aan Komariah²⁾, Eka Prihatin³⁾

¹²³⁾Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan

¹²³⁾Universitas Pendidikan Indonesia

Correspondence Email: andika.pramaisella@gmail.com

Received: Revised Accepted Available online

Abstract.

This study entitled the evaluation of the zoning system on the absorption capacity of SMA Negeri 1 Cibadak. The general objective of this study is to determine the extent of the success of the zoning system implemented by the government in absorbing students in SMA Negeri 1 Cibadak. This study uses a descriptive method using a qualitative approach. Data collection using the interview method. The population in this study were the principal, the head of PPDB, and 2 teachers at SMA Negeri 1 Cibadak. The data were analyzed by data reduction and drawing conclusions in narrative form. The results showed that the evaluation of the zoning system began with the acceptance of new students using the provisions set by Education and Culture, 50% of students from the zoning system, 25% of the achievement pathway, 15% of the affirmation pathway, and 5% of the parent transfer path. The quality of the school is very decisive for the results of this program, the quality of the teachers also determines the final outcome of the students who attend SMA Negeri 1 Cibadak. This is the spirit of the achievement of students and schools. For this reason, SMA Negeri 1 Cibadak feels that it can accept all students in the implementation of new students for the 2020-2021 school year quota of 36 people times 12 classes.

Keyword: Zoning System, Student Absorption

1. PENDAHULUAN

Pada implementasi pemerataan pendidikan kita bisa melihat kota-kota besar sara dan prasarana pendidikan sudah sangat maju, sedangkan di desa-desa dan beberapa wilayah tertentu Indonesia timur berbanding terbalik, masih banyak ditemukan fasilitas sekolah yang menggunakan sarana dan prasarana seadanya bahkan kurangnya tenaga pengajar, padahal sarpras merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, dengan adanya pengelolaan yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Sebenarnya permasalahan ini tidak hanya terjadi di desa, pada wilayah perkotaan pun kita masih menemukan tidak meratanya system pendidikan, meskipun dengan kasus berbeda misalnya anak usia sekolah yang berada pada tingkat ekonomi lemah tidak bisa

mengenyam pendidikan karena dia harus bekerja membantu orang tua, walaupun sekolah-sekolah yang biasa dengan kualitas guru dan sarpras yang sederhana, berbeda dengan anak yang secara ekonomi mampu, mereka bisa mengikuti les dan akhirnya mereka masuk sekolah bagus. Dari problema tersebut perlu adanya peningkatan pemerataan pendidikan terutama peningkatan pendidikan terutama yang disasarkan kepada masyarakat kurang mampu dan masyarakat terpencil. Meskipun pada kenyataannya program pemerintah terus bergulir dari program yang dimulai pada 1984 tentang pemerataan pendidikan Sekolah Dasar, lalu pada tahun 1994 wajib belajar pendidikan Sembilan tahun yang merupakan lanjutan dari program wajib belajar 6 tahun, kemudian dilanjutkan dengan pemberian beasiswa yang salah satunya mendorong keterlibatan

masyarakat melalui gerakan Nasional Orang Tua Asuh, setelah itu berlanjut ke dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sebagainya.

Sebelum adanya program zonasi, banyak anak yang baru lulus dari sekolah menengah pertama tidak bisa melanjutkan untuk bersekolah di sekolah sekolah favorit, sehingga tidak terjadinya pemerataan siswa. Komite sekolah menurut Kepmendiknas No.044 tahun 2002 merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komite sekolah berfungsi sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator antara masyarakat, sekolah dan pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, komite sekolah memiliki fungsi untuk memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan Dalam arti lain yaitu sekolah dengan kualitas biasa saja semakin biasa saja, sementara sekolah yang terkenal favorit semakin maju pesat. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan kualitas antar sekolah di kabupaten Sukabumi khususnya.

Melanjutkan upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pendidikan adalah dengan penetapan system zonasi yang tertera pada permendikbud no 14 tahun 2018, yaitu "Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah", dengan demikian siapa yang lebih dekat dengan sekolah ia lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas dan diharapkan mampu menyinergikan tripusat pendidikan yaitu sekolah, masyarakat dan keluarga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat secara umum bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Hal terpenting PPDB Zonasi adalah anak bisa

mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah atau tempat tinggalnya, jika dalam satu zona kelebihan kuota maka dinas pendidikan wajib mencarikan sekolah atau membuka rombel tambahan, sehingga tidak ada anak yang tidak mendapatkan sekolah.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Permendikbud No. 17 Tahun 2017 mulai diterapkan pada ajaran baru tahun 2017 yaitu bulan Juli Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru diketahui bahwa siswa yang diterima melalui sistem zonasi memiliki kemampuan belajar yang relatif rendah. Mereka cukup kesulitan dalam memahami materi yang telah disampaikan. Berbeda dengan siswa yang diterima melalui jalur prestasi, mereka lebih cepat dalam memahami materi. Bahkan diantara siswa yang diterima melalui menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan variabel agar dapat tergambarkan seluruh objek penelitian secara akurat. Kemudian menurut Zainal Arifin (2011, hlm. 41) metode deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan (to describe), menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini, baik tentang fenomena sebagaimana adanya maupun sistem zonasi ada siswa yang masih kesulitan dalam membaca.

Prestasi belajar yang dimiliki para siswa yang diterima melalui sistem zonasi pun tergolong rendah, terlihat dari data nilai hasil ujian tengah semester mata pelajaran

PPKn, dari 128 siswa 59 siswa diantaranya mendapatkan nilai yang belum memenuhi kriteria kelulusan minimal yaitu 75.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai evaluasi sistem zonasi terhadap daya serap Peserta didik di SMAN 1 Cibadak.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2005, hlm. 5) mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada”. Sementara, Burhan Bungin (2007, hlm. 68) mengemukakan bahwa “penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara deskriptif, meringkas berbagai kondisi yang ditemukan dilapangan atau yang menjadi objek penelitian”. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai evaluasi sistem zonasi terhadap daya serap peserta didik di Sman 1 Cibadak. Partisipan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, ketua PPDB, guru kelas (wali kelas). Lokasi yang di pilih oleh peneliti yakni Sman 1 Cibadak Sukabumi.. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (interview), observasi (pengamatan) dan studi dokumentasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) SMAN 1 Cibadak

Penerimaan peserta didik baru adalah hal yang paling berdampak dalam di berlakukannya system zonasi. Banyak aspek yang harus diperhatikan dalam penerimaan peserta didik baru di SMAN 1 Cibadak ini diantaranya kriteria siswa yang dapat masuk dan diterima untuk bersekolah di SMAN 1 cibadak. Di sisi lain PPDB merupakan tahap

awal untuk melihat kualitas siswa dalam menentukan prestasi sekolah nantinya.

Hal ini selaras dengan pernyataan pihak sekolah bahwa PPDB di SMAN 1 Cibadak mengikuti kebijakan pemerintah mengenai system zonasi yakni dengan menerima 50% dari jaur Zonasi, 30% prestasi, 15% Afirmasi dan 5 Persen perpindahan tugas.

a) Objektif

Dalam penerimaan peserta didik baru dalam system zonasi, ada hal yang lebih penting yaitu ke tidak berpihakan dari sekolah untuk menerima peserta didik baru, semisal peserta didik baru yang sudah mendapatkan tempat meskipun tidak memenuhi kriteria yang di miliki oleh peserta didik tersebut. Hal ini berakibat pada ketidak percayaan masyarakat yang berimbas pada kualitas sekolah. Hal ini dulu terjadi di SMAN 1 Cibadak, Dalam kasus ini peneliti memberikan pertanyaan kepada narasumber mengenai hal ini. Menurut narasumber bapak Isda Sugara “Kita khususnya SMAN 1 Cibadak tidak ada siswa yang menjadi siswa di prioritaskan untuk masuk sekolah ini kecuali memenuhi kriteria PPDB pada tahun ini.”

b) Akuntabel atau Dapat Dipertanggung Jawabkan

System zonasi merupakan salah satu program pemerintah yang di tujukan untuk pemerataan pendidikan. Hal ini di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Sman 1 Cibadak telah menerapkan peraturan menteri mengenai sistem Zonasi

Untuk itu pihak sekolah atau dari SMAN 1 Cibadak mengutarakan bahwa semua yang dilakukan di sekolah ini sudah mengikuti aturan dari pemerintah, dan nanti pun penyeleksian langsung dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Kita hanya memberikan data siswa baru saja, nantinya akan muncul hasil

yang akan di ambil untuk sekolah untuk penerimaan peserta didik baru.

c) **Transparansi**

Transparansi merupakan hal yang harus dilakukan dalam penerimaan peserta didik baru untuk mengurangi rasa tidak percaya masyarakat kepada pihak sekolah, untuk itu Di sman 1 cibadak saat seleksi dan pengumuman kelulusan selalu di update di papan sekolah dan di website resminya semacam pengumuman yang ditujukan untuk masyarakat luas mengenai apa saja kriteria yang dapat diterima disekolah ini, dan mengapa jika ada siswa yang diterima disekolah ini

Menurut Bapak Isda Sugara selaku ketua PPDB SMAN 1 Cibadak 2020/2021. Kita disini melakukan hal-hal yang seharusnya kami lakukan terkait transparansi. Langkah awal yang kita lakukan adalah memberikan pengumuman baik di depan sekolah menggunakan baligp ataupun menggunakan website resmi kami. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan bertanya Tanya mengenai penerimaan peserta didik baru di SMAN 1 Cibadak ini. Bahkan hasil dari seleksi pun kita pampang di website resmi kami yaitu www.sman1cibadak.sch.id.

d) **Tanpa Diskriminasi**

Setelah semua hal atau aspek itu dilakukan hal inipun tidak kalah penting yaitu tidak membeda bedakan antara anak a dan b. jika hal ini terjadi maka pemerataan pendidikan yang di canangkan oleh pemerintah tidak berhasil. Untuk hal ini sman 1 cibadak menerima semua anak yang ingin bersekolah di sman 1 Cibadak dengan syarat Ia harus memenuhi kriteria yang di tentukan. Hal terkait diskriminasi ini di ungkapkan oleh bapak Isda : “SMAN 1 Cibadak tidak membedakan baik itu anak a dan anak b, putra dari bapak a dan b, ras, suku, kulit, agama dan lainnya. Sehingga penerimaan siswa baru di Sman 1 cibadak adalah murni dari apa yang di atur pemerintah. Hal tersebut di ungkapkan kepala sekolah juga : tidak ada itu yang namanya

diskriminasi dalam bersekolah disini, semuanya sama kok, jadi jangan takut untuk bersekolah.”

2. **Mutu Sekolah**

Di SMAN 1 Cidadak sendiri guru dan kepala sekolah sering diikutkan dalam pelatihan pelatihan untuk mengembangkan diri guru dan kepala sekolah. Sehingga Sman 1 Cibadak dapat mempertahankan prestasinya.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekolah: “ kita sering ikut pelatihan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja kita dalam mengelola sekolah, Bahkan guru-guru pun ikut dalam lomba lomba dan selalu berprestasi.

a) **Memiliki Kebijakan, Tujuan, dan Sasaran Mutu yang Jelas**

Kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas merupakan hal yang sangat penting untuk membuat sekolah bermutu. Jika tidak mempunyai tujuan tersebut maka sekolah akan menjadi sia sia.

Menurut kepala sekolah : “ kita mempunyai guru dan staf yang cukup baik dalam hal jumlah ataupun kemampuan, hal itu dibuktikan dengan output yang diciptakan guru-guru disini dan prestasi yang mereka dapat selama mereka mengajar disini.

b) **Sekolah Memiliki Harapan Prestasi yang Tinggi.**

Salah satu indicator yang mencerminkan bahwa sekolah tersebut memiliki mutu yang baik selain dari visi misi dan sarana prasarana nya yaitu mempunyai prestasi yang tinggi. Prestasi seperti olimpiade, debat Bahasa inggris, kesenian sudah sangat akrab dengan Sman 1 Cibadak. Prestasi tersebut menjadi tolak ukur untuk masyarakat agar menyekolahkan anak nya di sekolah tersebut.

Sama halnya dengan SMAN 1 Cibadak, sekolah ini sebagaimana dijelaskan oleh kepala sekolah bahwa “ SMAN 1 Cibadak merupakan sekolah dengan prestasi belajar yang tinggi dan kitapun menerapkan system belajar yang

baik serta tenaga pendidik yang baik pula. Alhasil Sman 1 cibadak mempunyai prestasi di wilayah Jawa Barat dan Nasional baik guru maupun muridnya.

c) **Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting bagi sekolah dalam menunjang kegiatan pemerintah yaitu zonasi. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai sangatlah mustahil bagi pemerintah dan sekolah menyamaratakan pendidikan di seluruh Indonesia. Zonasi dipandang bisa efektif apabila disertai pemerataan sarana prasarana pendidikan mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Nepal (2019) menunjukkan bahwa kualitas udara yang bersih dan baik, cahaya yang baik, lingkungan nyaman, aman, usia dan kondisi bangunan, kualitas pemeliharaan dapat memengaruhi kesehatan, keselamatan serta kondisi psikologis siswa. Lebih lanjut ia menguraikan Pembuat kebijakan harus memperhatikan hubungan antara fasilitas Infrastruktur sekolah dan pembelajaran dan prestasi siswa. Disisi lain penelitian yang dilakukan Liu (2017) menyebutkan baik jumlah dana maupun jumlah guru memang menyebabkan banyak ketidaksetaraan di sekolah yang berbeda. Artinya, keberadaan sarana prasarana sekolah memiliki kontribusi terhadap pemerataan kualitas sekolah. Dari dua penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerataan sarana fasilitas pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Gedung dan sarana yang menunjang pendidikan di SMAN 1 Cibadak sudah mencukupi untuk menampung siswa baru dalam masa PPDB ini.

Hal itu dirasa cukup untuk memenuhi persyaratan aspek belajar mengajar di SMAN 1 Cibadak ini. Selain itu kami juga sedang membangun ruangan-ruangan baru yang nantinya digunakan sebagai lab, ruang kelas, dan sebagainya. Sehingga kita SMAN 1

Cibadak siap dan merasa cukup untuk menampung siswa baru sesuai ketentuan pemerintah melalui program zonasi.

Menurut bapak Kepala Sekolah : “ Gedung kita meskipun tempatnya kecil tidak seperti sekolah lain alhamdulillah saya rasa cukup untuk menunjang hal itu. Selain itu kami juga terus melakukan pembangunan untuk menambah ruangan yang menunjang pembelajaran”.

3. **Daya Serap Peserta Didik**

a) **Penerimaan Siswa Zonasi**

Penerimaan siswa system Zonasi merupakan jalur penerimaan siswa berdasarkan zona tempat tinggal. Sman 1 Cibadak pun menerapkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. PPDB tahun 2020 dapat diikuti calon siswa yang akan masuk TK, SD, SMP, serta SMA/SMK. Aturan yang telah ditandatangani Nadiem Makarim, Mendikbud pada tanggal 10 Desember 2019 ini resmi diterapkan.

Penggunaan sistem zonasi untuk penerimaan siswa baru merupakan salah satu jalur untuk bisa diterima di sekolah. Penerapan sistem zonasi sebenarnya menasar siswa baru agar mendaftar sekolah sesuai tempat tinggal. Aturan sistem zonasi PPDB tercantum pada Permendikbud No. 14 Tahun 2018. Harapannya, sekolah favorit dan non-favorit tidak memiliki gap. Tahun 2020, kuota yang diberikan untuk jalur zonasi PPDB sebanyak 50 persen.

Seperti yang diungkapkan bapak kepala sekolah : “ Kita dari awal penetapan sistem Zonasi sudah langsung menerapkan peraturan ini. Dan setelah diterapkan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan baik. Dan diharapkan bisa ikut berpartisipasi dalam pemerataan pendidikan di Indonesia”.

b) **Kriteria Penerimaan Peserta Didik**

Kriteria penerimaan peserta didik system zonasi diatur dalam Permendikbud

Nomor 14 Tahun 2018, beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai sistem zonasi dalam PPDB 2018 diantaranya:

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
3. Radius zona terdekat dalam sistem zonasi ditetapkan oleh pemda sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah.
4. Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemda dengan melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.
5. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase penerimaan siswa dan radius zona terdekat dapat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
6. Calon siswa di luar zonasi dapat diterima melalui beberapa cara yakni: a) Melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. b) Alasan perpindahan domisili orangtua/wali atau alasan terjadi bencana alam/sosial dengan paling banyak 5% (lima persen) dari total keseluruhan siswa yang diterima.
7. Sistem zonasi menjadi prioritas utama atau terpenting dalam PPDB jenjang SMP dan SMA. Setelah seleksi zonasi

baru kemudian dipertimbangkan hasil seleksi ujian tingkat SD atau hasil ujian nasional SMP untuk tingkat SMA.

8. Untuk jenjang SD, sistem zonasi menjadi pertimbangan seleksi tahap kedua setelah faktor minimum usia masuk sekolah sudah terpenuhi. Sedangkan bagi SMK sama sekali tidak terikat mengikuti sistem zonasi.

c) Perbedaan Sebelum dan Seseudah Adanya System Zonasi

Sebelum adanya sistem zonasi, Sman 1 Cibadak selalu menjadi sekolah pilihan bagi masyarakat sukabumi, hal ini dikarenakan prestasi siswa yang baik dibuktikan dengan lulusan sekolah ini banyak yang diterima di perguruan-perguruan tinggi negeri dan swasta yang terkemuka. Setelah diberlakukannya sistem zonasi prestasi Sman 1 Cibadak tidak menurun, bahkan bisa mewakili Indonesia untuk pentas olimpiade geografi Internasional.

Menurut bapak kepala sekolah :Untuk perbedaan sebelum dan sesudah adanya Zonasi bagi sman 1 cibadak tidak ada bedanya, baik dari segi prestasi sekolah dan prestasi siswa .

Demikian juga menurut bapak Isda Sugara terkait perbedaan sebelum dan sesudah adanya system Zonasi : Kalau dari segi nilai tidak ada perbedaan baik dari hasil ujian akhir maupun nasional, dikarenakan pihak Sman 1 Cibadak mempunyai guru-guru yang kualitasnya baik, sehingga dapat menghasilkan siswa dengan kemampuan yang baik juga. Jika di segi PPDB dan hal hal yang lain menurut saya tidak ada bedanya. Hanya saja dalam penerimaan peserta didik kita harus memperhatikan rujukan peraturan dari pemerintah.

d) Siswa Putus Sekolah di Lingkungan Sekolah Setelah Adanya System Zonasi

Untuk siswa putus sekolah di lingkungan SMAN 1 cibdak sejauh ini belum ada, karena selain sman 1 cibadak

dilingkungan inipun ada sekolah lain yang menampung siswa di lingkungan tersebut. begitupun setelah diberlakukannya sistem Zonasi tidak ada, menurut apa yang di paparkan bapak Kepala Sekolah: “Sebelumnya ada yang putus sekolah, tapi semenjak adanya sistem zonasi angka untuk putus sekolah berkurang, karena siswa yang tadinya tidak bisa bersekolah karena nilai kurang ataupun karena ekonomi yang lemah bisa bersekolah di sekolah terdekat dari rumah. Ini tidak hanya berlaku di Sman 1 Cibadak saja, tapi hamper di kawasan Sukabumi kota maupun kabupaten.”

e) Prestasi Sekolah

Prestasi sekolah merupakan alat ukur bagi pihak orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya di Sman 1 Cibadak. Prestasi sman 1 cibadak di kancan kabupaten maupun nasional sangatlah banyak, mulai dari olimpiade, seni, dan terakhir pada tahun 2019 Sman 1 Cibadak mengieimkan wakilnya untuk olimpiade geografi ke luar negeri, hal ini selaras dengan ungkapkan bapak kepala sekolah melalui wawancara yang dilakukan peneliti bahwa : “SMAN 1 Cibadak merupakan sekolah dengan prestasi yang tinggi di kawasan Sukabumi, tidak hanya prestasi di dalam kota, luar kota bahkan nasional pun kita pernah raih.”

f) Terlibat dalam Kegiatan Luar

Keterlibatan dalam kegiatan perlombaan diluar seperti perlombaan robotic, olimpiade dan lainnya sman 1 cibadak sering mengikuti. Tidak hanya sekedar mengikuti tapi sering menjuarai lomba lomba tersebut. Dikutip dari pernyataan bapak Isda : “Kita setiap tahun selalu menjadi perwakilan sukabumi untuk perlombaan di tingkat Nasional, dan Alhamdulillah bukan sekali dua kali kita selalu menjadi salah satu yang terbaik dalam perlombaan tersebut. Itu halnya Sman 1 Cibadak merupakan salah satu sekolah yang menjadi perburuan orangtua siswa untuk menyekolahkan anaknya di Sman 1 Cibadak.”

g) Menjadi Peserta Didik di Program Zonasi yang Memiliki Prestasi

Peserta didik yang masuk melalui sistem Zonasi diharapkan untuk mempertahankan prestasinya dan mengharumkan pihak sekolah dalam mengikuti perlombaan-perlombaan. Pada nyatanya di Sman 1 cibadak prestasi siswa masih seperti dulu, bahkan selalu bertambah dalam segi kejuaraan. Seperti yang dikatakan bapak Isda bahwa : “Di tahun kemarin Sman 1 cibdak menjuarai beberapa perlombaan di tingkat kabupaten dan siswa tersebut merupakan siswa yang masuk melalui sistem Zonasi. Jadi anggapan selama ini mengenai sistem zonasi dapat menurunkan kualitas sekolah rasanya kurang tepat, karena jika kita bisa mengolah anak tersebut dengan baik bukan tidak mungkin anak tersebut bisa lebih berprestasi.”

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai evaluasi sistem zonasi terhadap daya serap peserta didik di SMAN 1 Cibadak berdasarkan hasil temuan dan hasil pembahasan penelitian yang diuraikan pada bab IV, sebagaimana temuan-temuan di lapangan yang dikomparasikan dengan teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian mengenai evaluasi sistem zonasi terhadap daya serap peserta didik di SMAN 1 Cibadak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sistem Zonasi merupakan program dari pemerintah untuk menyama ratakan kualitas pendidikan di Indonesia, akan tetapi hal tersebut tidaklah mudah bagi instansi terkait untuk melaksanakannya. Di SMAN 1 Cibadak sendiri pelaksanaan Sistem Zonasi tidaklah berdampak pada segala aspek. Di aspek PPDB sendiri SMAN 1 Cibadak menerima siswa baru melalui sistem zonasi sebagaimana anjuran pemerintah, hal tersebut tidak menjadi kendala karena SMAN 1 Cibadak mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung sehingga tidak ada kata siswa yang tidak diterima akibat tidak ada

kuota. Selain itu hal penunjang lainnya yakni SMAN 1 Cibadak mempunyai guru-guru yang siap untuk mengajar dan mempunyai kualitas yang baik juga, sehingga nantinya kualitas siswa yang diterima di SMAN 1 Cibadak tidak mempengaruhi prestasi sekolah.

Penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi ternyata dapat menekan angka putus sekolah di lingkungan Sman 1 Cibadak. Sman 1 Cibadak selalu memberikan yang terbaik untuk para siswanya sehingga untuk hal ini para guru sering diikutkan perlombaan untuk mengasah kemampuannya dalam mengajar. Sehingga apa yang ia dapat diturunkan kembali untuk siswa Sman 1 Cibadak

Pihak sekolah menerima kebijakan pemerintah mengenai sistem zonasi, karena beberapa alasan yakni :

- Mendukung pemerintah dalam pemerataan kualitas pendidikan
- Tidak berpengaruh banyak untuk sekolah karena sekolah dapat menyesuaikan diri dalam melaksanakan sistem zonasi
- SMAN 1 Cibadak mempunyai sarana prasarana dan aspek lain untuk menunjang pelaksanaan sistem zonasi

Sehingga khususnya di Sman 1 cibadak sendiri pelaksanaan sistem zonsi dapat berjalan dengan baik dan bisa menerima semua peserta didik yang mendaftar melalui sistem zonasi, sehingga Sman 1 Cibadak dapat membantu pemerintah untuk menyamaratakan kualitas pendidikan di Indonesia, dan tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah dengan alasan apapun

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara (kajian konsep, teori, dan fakta dalam upaya menciptakan good governance)*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Moelong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: CV. ADOYA Mitra Sejahtera.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Ulfah, asri. Dkk. 2016. “ Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online”. Diakses pada <http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php>

Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (konsep, aplikasi dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*. Bandung: Mandar Maju.

Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Clyapps Diponegoro University